

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Tempo

Siswa Tak Mampu di Sekolah Swasta Tetap Terima Bantuan

Nilai bantuan untuk murid tak mampu di sekolah swasta lebih besar.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA — Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan tidak semua calon siswa baru bisa tercampung di sekolah negeri. Dinas Pendidikan meminta orang tua murid—khususnya dari kalangan tidak mampu atau pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP)—tak risau jika anaknya melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.

"KJP tidak akan dihentikan ketika anak sekolah di swasta," kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana dalam rapat dengar pendapat dengan perwakilan orang tua murid dan anggota Komisi Bidang Kesejahteraan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta,

kemarin.

Sebelumnya, banyak orang tua siswa yang menolak syarat usia dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini. Bahkan, dua hari lalu, puluhan orang tua yang tergabung dalam Gerakan Emak dan Bapak Peduli Pendidikan dan Keadilan menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menolak aturan tersebut dalam pendaftaran siswa baru.

Nahdiana menuturkan nominal bantuan KJP untuk siswa yang bersekolah di maktab swasta lebih besar dibandingkan dengan penerima program serupa di sekolah negeri. Sebab, pemegang KJP akan mendapat tambahan uang untuk iuran sekolah. "Jadi, ada tambahan uang untuk SPP (sumbangan pembinaan pendidikan)," ujarnya.

Dinas Pendidikan, kata Nahdiana, telah mengeluarkan surat instruksi pada 5 Mei lalu untuk semua sekolah di Jakarta agar tidak mempersulit calon siswa baru. "Untuk memastikan agar tidak ada lulusan yang tidak sekolah," katanya.

Selain itu, ia melanjutkan, Dinas Pendidikan membuat program kolaborasi antara sekolah negeri yang dianggap bagus dan sekolah swasta. Sejauh ini, ada sepuluh maktab negeri yang bermitra dengan maktab swasta. Program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas sekolah swasta. "Guru-gurunya juga saling belajar agar kualitas sekolahnya bisa berimbang," ucapnya.

Nahdiana menuturkan, dalam sistem PPDB tahun ini, tingkat kemampuan siswa di sekolah tidak akan

homogen lagi. Misalnya, satu sekolah mayoritas berisi siswa pintar atau kaya saja. "Sehingga ke depannya tidak ada polarisasi," tuturnya.

Dinas Pendidikan, kata Nahdiana, telah membuat simulasi keterisian bangku sekolah melalui jalur seleksi PPDB. Ada sejumlah jalur pendaftaran siswa baru, antara lain zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua serta anak guru. Hasilnya, satu kelas yang terdiri atas 36 murid akan berisi siswa dengan kemampuan akademik dan ekonomi yang berbeda-beda.

Nahdiana meminta orang tua murid mencoba semua jalur PPDB dan tidak mempersoalkan usia sebagai salah satu persyaratan masuk sekolah. Salah satu jalur yang seleksinya digelar pada 25-27 Juni

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Tempo

Siswa Tak Mampu di Sekolah Swasta Tetap Terima Bantuan

mendatang ialah zonasi.

Salah satu orang tua siswa yang mengeluhkan sistem PPDB tahun ini ialah Dewi Yurnita. Perempuan berusia 45 tahun ini harus merelakan anaknya gagal masuk SMK Negeri 26 Jakarta melalui jalur afirmasi—pemegang KJP.

Menurut Dewi, anaknya yang berusia 15 tahun enam bulan itu kalah oleh calon murid lain yang usianya lebih tua. Calon siswa termuda yang diterima di SMK 26 melalui jalur afirmasi berusia 17 tahun. "Anak saya tergeser," kata perempuan yang tinggal di Rumah Susun Pinus Elok, Cakung, Jakarta Timur, ini,

Senin lalu.





Dewi belum terpikir untuk memasukkan anaknya ke sekolah swasta jika gagal dalam seleksi masuk SMK negeri tahun ini. Dia khawatir tidak bisa membiayai anaknya di sekolah swasta karena ia orang tua tunggal yang sehari-hari berjualan jajanan.

Ketua Komisi Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD DKI, Iman Satria, berpendapat bahwa sistem PPDB tahun ini sebaiknya dilanjutkan lebih dulu. Adapun jika ditemukan kekurangan, sistem ini bisa diperbaiki tahun depan.

● GANGSAR PARIKESIT | LANI DIANA

Daya Tampung Terbatas

DINAS Pendidikan DKI Jakarta hari ini mulai membuka penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui jalur zonasi untuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Kepala Dinas Pendidikan DKI Nahdiana menurunkan daya tampung siswa di sekolah negeri terbatas. Karena itu, siswa yang tidak diterima di sekolah negeri terpaksa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.

Jenjang	Negeri	Swasta
	SD 106.432	SD 54.176
	SMP 70.702	SP 65.196
	SMA 28.428	SMA 35.244
	SMK 19.182	SMK 71.388

Keterangan:

Persentase ketersediaan di SMP negeri sebesar 46,21 persen dan SMA-SMK negeri 32,93 persen.

Simulasi siswa baru SMA:

- › Inklusi: dua siswa
- › Afirmasi tanpa kuota: satu siswa
- › Afirmasi KJP, KPJ, DTKS, Jak Lingko: delapan siswa
- › Prestasi akademik: tujuh siswa
- › Prestasi non-akademik: dua siswa
- › Zonasi: 13 siswa
- › Luar DKI: dua siswa
- › Perpindahan orang tua dan anak guru: satu siswa
- › Total: 36 siswa dalam satu kelas

Keterangan:

- › KJP = pemegang Kartu Jakarta Pintar
- › KPJ = anak dari orang tua pemegang Kartu Pekerja Jakarta
- › Jak Lingko = anak dari orang tua pengemudi angkutan umum yang ikut program Jak Lingko
- › DTKS = anak terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial

● SUMBER: DINAS PENDIDIKAN DKI JAKARTA

● GANGSAR PARIKESIT